

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) TAHUN 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i-ii
Kata Pengantar	1
Bab I PENDAHULUAN	3
1.1. Cascading Kinerja	4
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.3. Isu- isu Strategis	
1.4. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana	
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja perangkat Daerah	25
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2.3. Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat daerah	35
2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1. Capaian Kinerja	
3.2. Realisasi Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022	51
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020,2021 dan 2022	51
3.4. Analisis Penyebab Kegagalan dan Keberhasilan Capaian Program/Kegiatan	52
3.5. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Anggaran	54
3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Tabel)	56

BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	79

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Secara substantif, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022, sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disusun berdasarkan masukan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu penyempurnaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan implementasi penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA 



TUTY ZAREFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650211 199006 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. CASCADING KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 dan secara operasional mulai melaksanakan fungsi dan tugas pada awal tahun 2017.

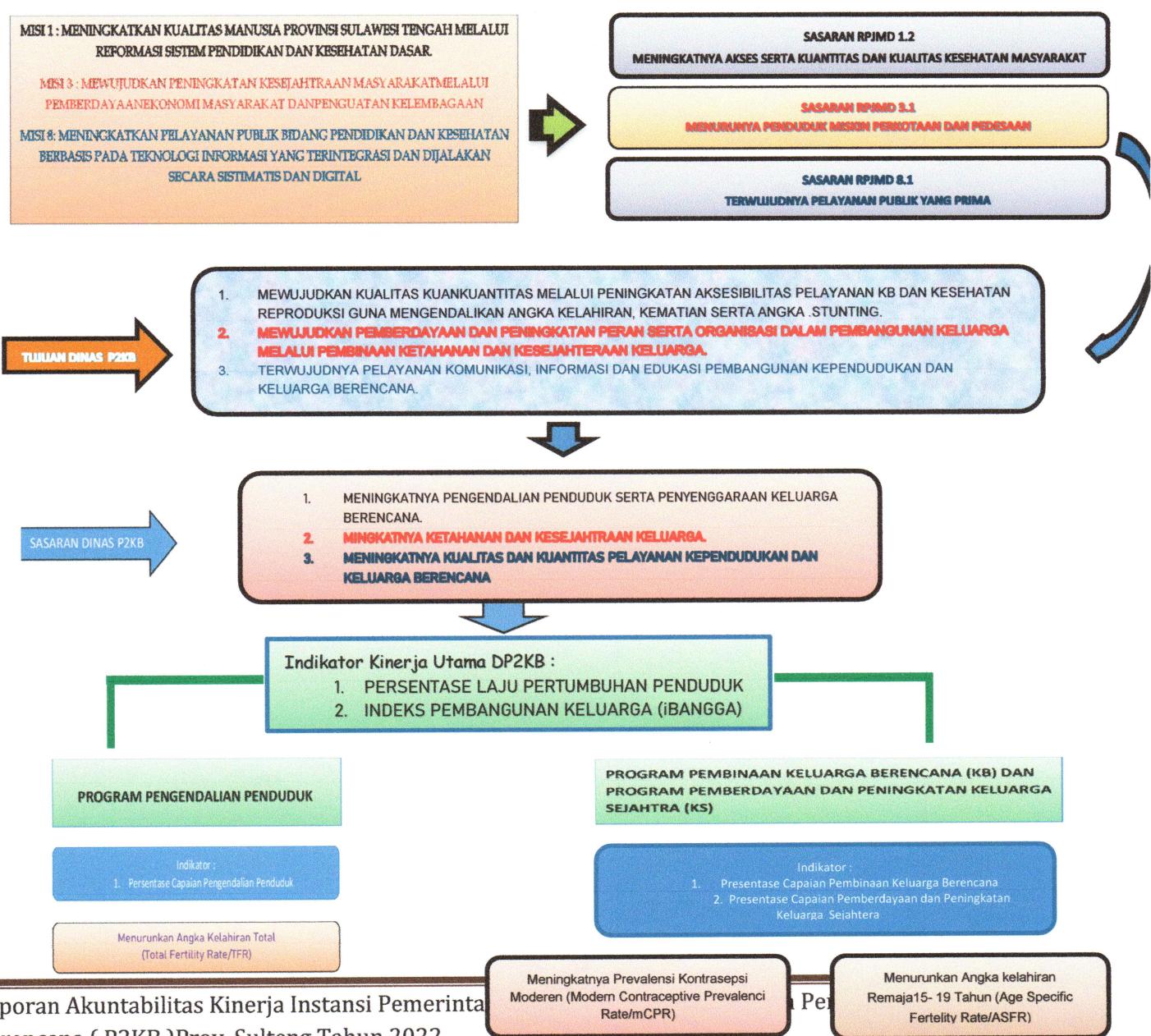
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2022, maka perlu dibuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi capaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

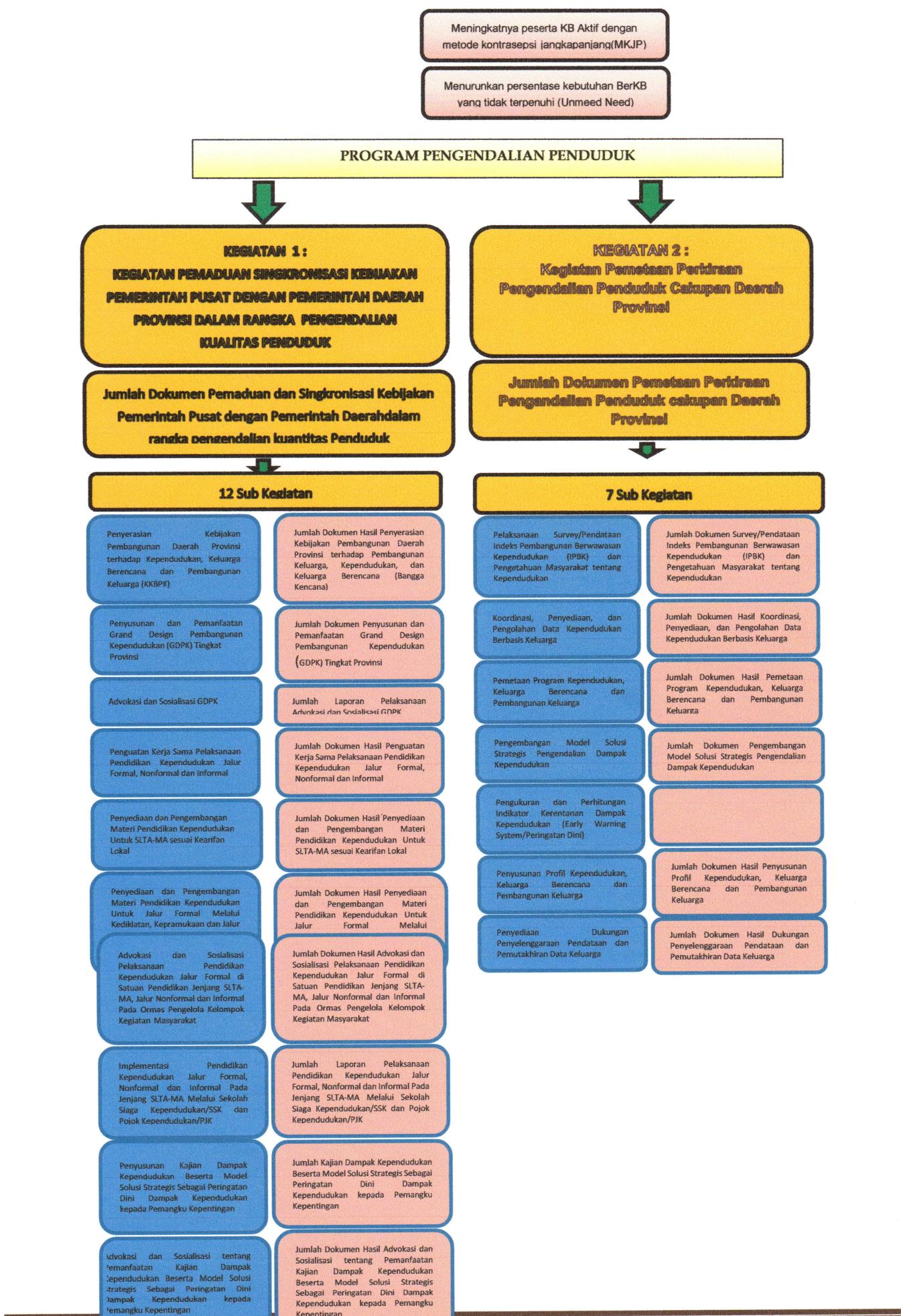
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai OPD yang baru terbentuk berupaya untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diupayakan beberapa pemberahan organisasi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu pelaku Sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, untuk memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal tersebut didukung Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Konkuren)

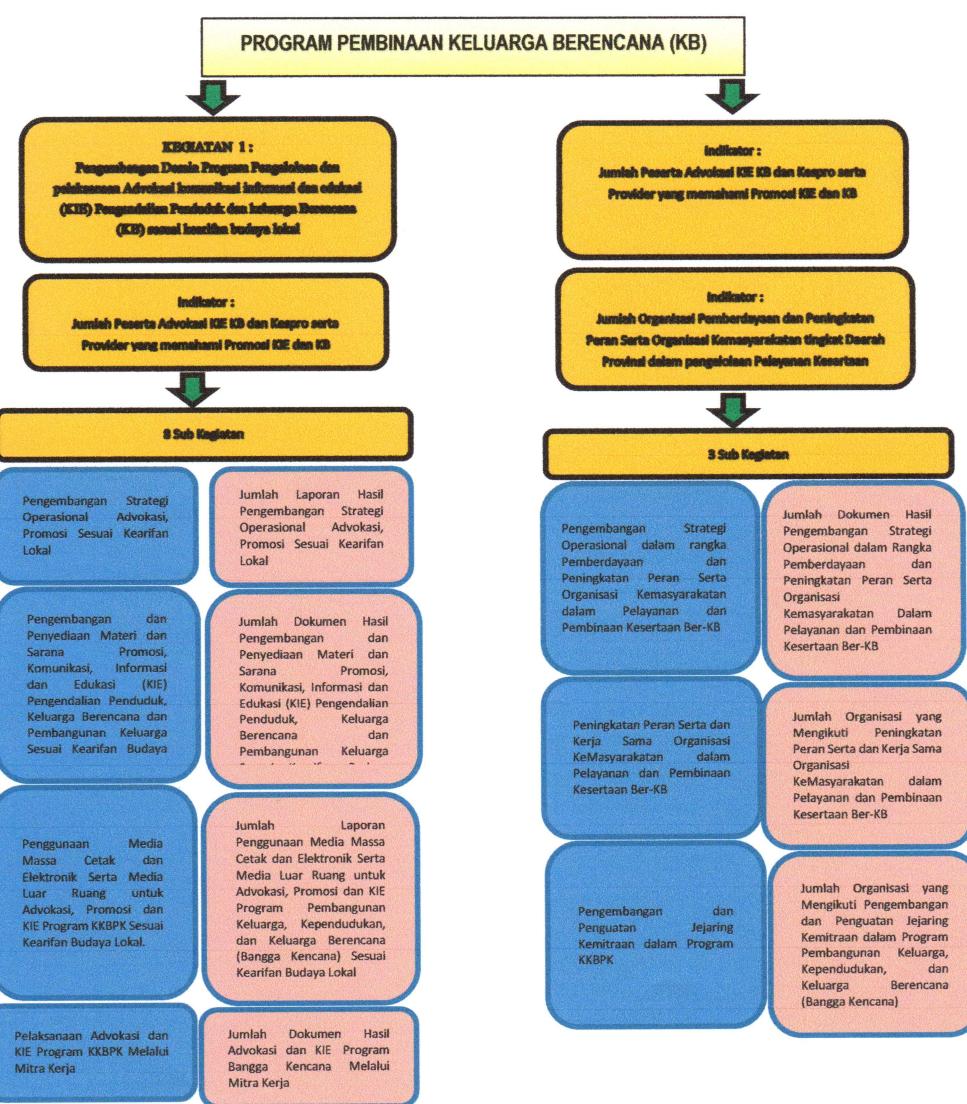
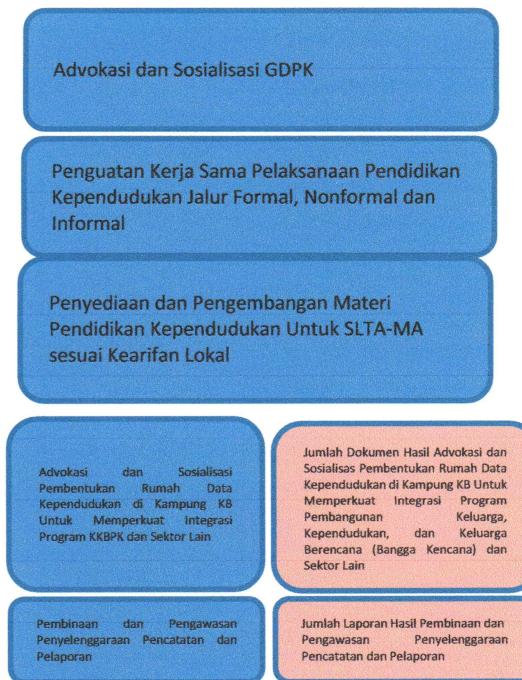
yang diharapkan dapat mewujudkan dan mengoptimalkan penanganan permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang terdiri dari masalah angka fertilitas penduduk, pemakaian kontrasepsi, dan masalah Stunting.

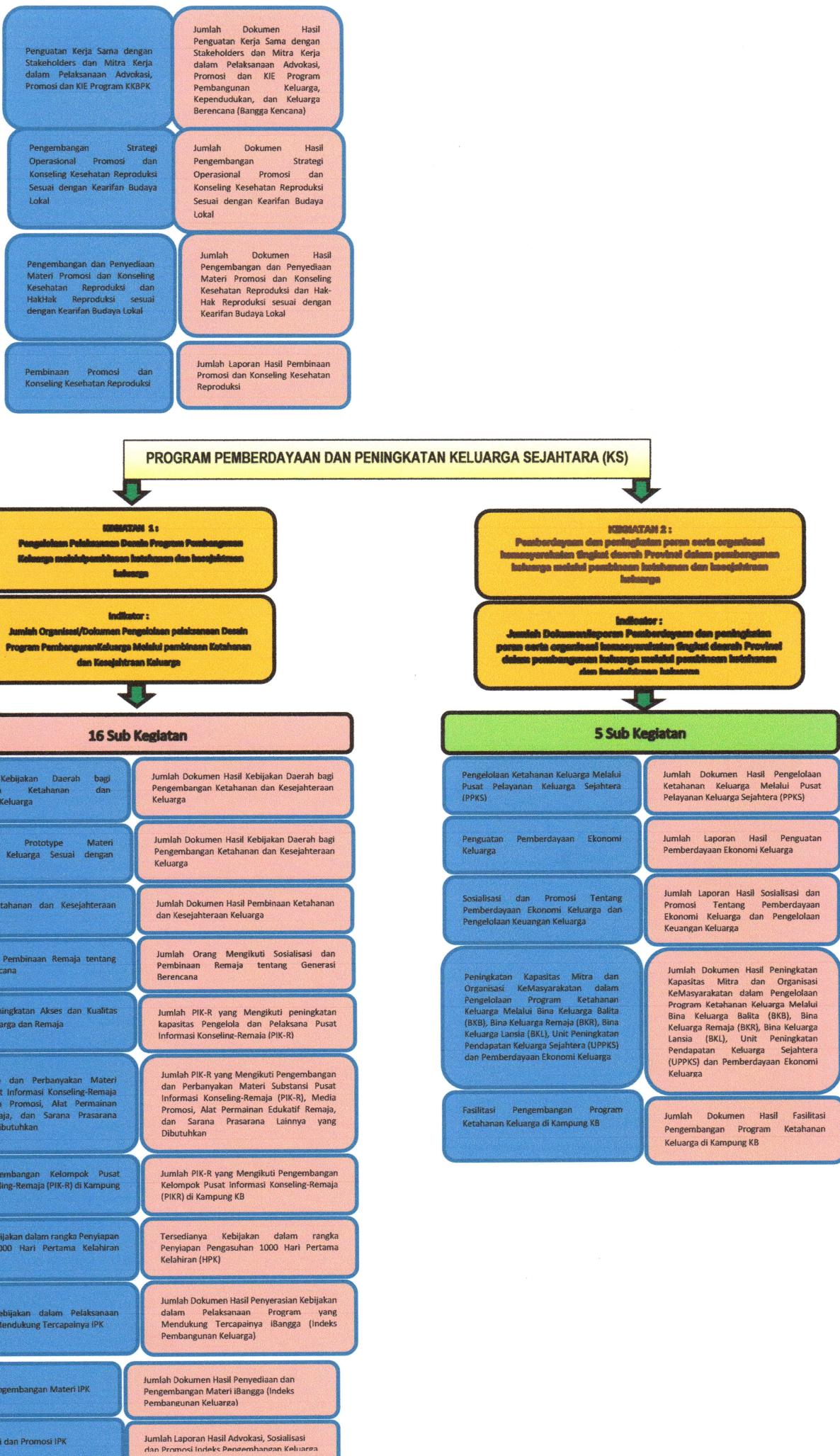
Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban amanat undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana di jelaskan bahwa Keluarga Berencana adalah Upaya mengatur Kelahiran Anak, Jarak dan Usia Ideal Melahirkan, Mengatur Kehamilan melalui Promosi, Perlindungan dan Bantuan sesuai dengan hak Reproduksi untuk Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna memgendarikan angka Kelahiran, Kematian serta Angka Stunting yang menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas dan fungsi didukung oleh sumber pembiayaan dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.









Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja tentang struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah. OPD yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas “*membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga*”.

Sedangkan untuk menjalankan tugas tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut

Tugas pokok :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan kebijakan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi fungsi perencanaan program dan penatausahaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta bagian data dan pelaporan.

Fungsi :

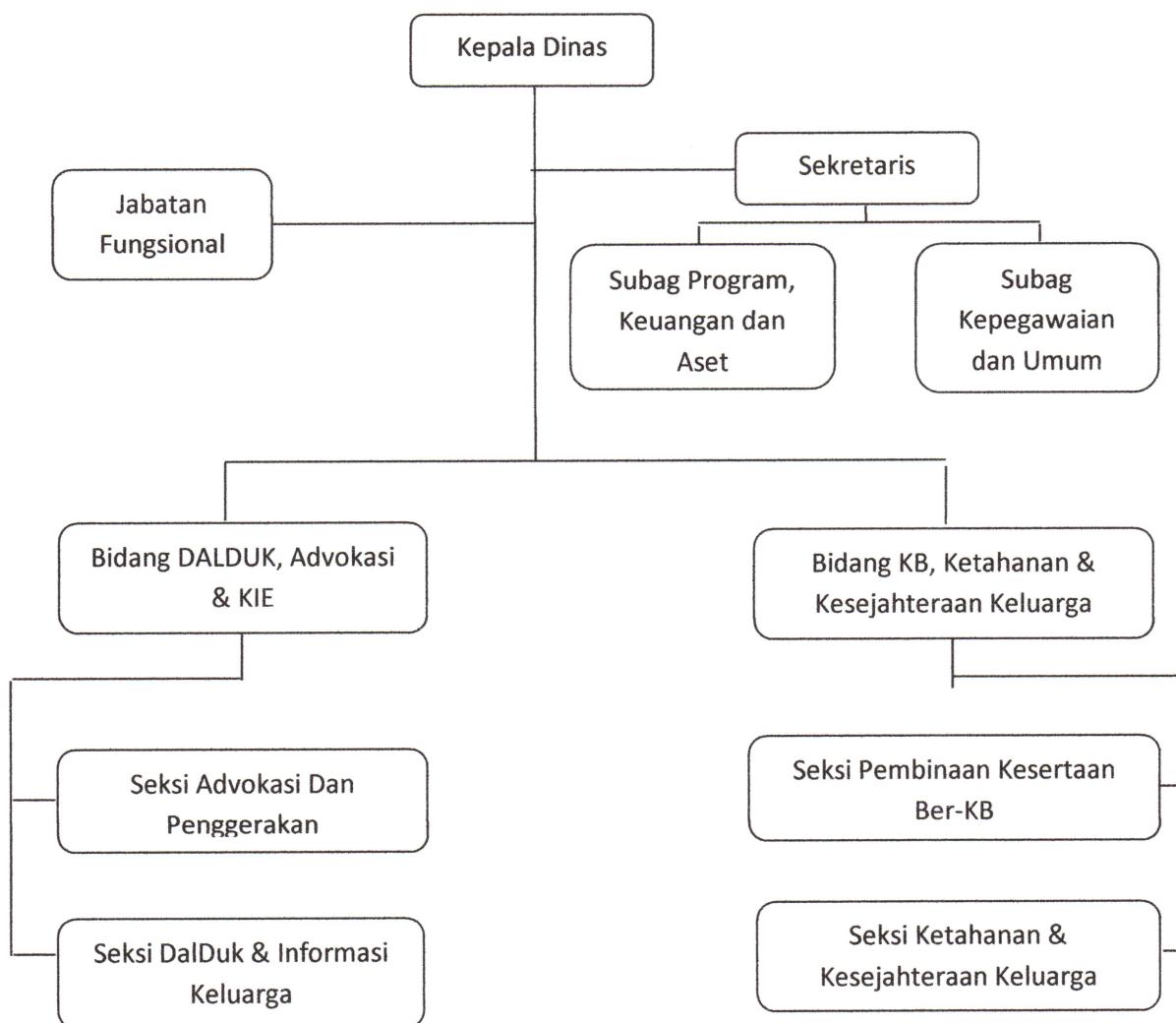
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Penetapan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilingkungan kabupaten dan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Prov. Sulteng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

- ⊕ Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- ⊕ Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- ⊕ Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Masing – masing.



Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1.2 Sekretariat

Tugas :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perpendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian:

1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

.2 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi

dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibantu oleh 2 (dua) Seksi :

a. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.

b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

.3 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh 2 (dua) Seksi:

a. Seksi Pembinaan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB.

b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan keluarga.

1.3 ISU- ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Isu Strategis.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 1 (Satu) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap program OPD, sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam Rencana Program jangka menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

1. Bonus demografi ; adalah Populasi Penduduk yang Produktif jauh lebih banyak ketimbang Penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi ini berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Indonesia. Dan Stunting merupakan ancaman yang serius terhadap bonus Demografi yang saat ini di rasakan Indonesia. Generasi yang Stunting bisa lahir apabila banyak yang kawin pada Usia Muda, Putus Sekolah, Mempunyai anak Banyak ,kemudian jarak kelahiran yang dekat, dan kematian ibu yang tinggi. Dari hasil survei status Gigi Tahun 2022 bahwa angka Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat tinggi yaitu 29,7% dan berada di urutan ke delapan tertinggi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan target yang ingin dicapai secara Nasional sebesar 14% pada tahun 2024 dan untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Yaitu sebesar 11%.

Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020- 2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR Nasional mengalami penurunan dari 2,6 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15- 49 tahun (SP 2010), menjadi 2,41 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Sementara TFR Sulawesi Tengah turun dari 2.71 (SDKI 2017) menjadi 2.61 (SKAP 2019)..

2. Aging population; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan Perhatian dan intervensi yang tepat;
3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga; Kebijakan Pembangunan Manusia Dilakukan Berdasarkan Pendekatan Siklus Hidup Dan Inklusif, Termasuk Memperhatikan Kebutuhan Penduduk Usia Lanjut Maupun Penduduk Penyandang Disabilitas. Narasi Ini, Bahkan Akan Lebih Komprehensif Apabila Dimulai Dari Gagasan Perencanaan Dari Tahap Pra Berkeluarga (Perencanaan Kehidupan Berkeluarga),

4. Merencanakan Keinginan Untuk Memiliki Anak Termasuk Jumlah Anak Yang Dikehendaki, Proses Kehamilan Yang Merupakan Fase Yang Juga Penting Dalam Proses Tumbuh Kembang Anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Periode Yang Dimulai Sejak Terbentuknya Janin Dalam Kandungan Hingga Anak Berusia 2 Tahun), Pendidikan Anak Usia Dini (Pra Sekolah) Sampai Dengan Usia Sekolah, Remaja Dengan Berbagai Pendekatannya Dalam Penyiapan Generasi Bangsa Yang Bekualitas Menuju Usia Produktif/Bekerja Serta Perhatian Terhadap Kelanjutusiaan Seluruh Tahapan Kehidupan);
5. Satu Data Kependudukan; Pemerintah Telah Menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia Adalah Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah Untuk Menghasilkan Data Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Kebenarannya. Disatu Sisi, Pendataan Keluarga (PK) Yang Menjadi Tugas Dan Kewenangan BKKBN, Harus Dapat Diintegrasikan Dengan Data Sektor Lain, Seperti Sensus Penduduk (SP), Serta Data Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil), Sehingga Dapat Terwujud Satu Data Yang Lengkap Baik Guna Mendukung Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Nasional, Maupun Untuk Mendukung Operasionalisasi Program/Kegiatan Bangga Kencana Di Lini Lapangan
6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), belum dipahaminya oleh masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, masih tingginya jumlah anak yang dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksi sekitar 3 sampai 4 anak, pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi cukup tinggi tapi tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB, Angka Spesifik Fertility Rate (ASFR) yang masih cukup tinggi, masih rendahnya cakupan KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

7. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) di Provinsi Sulawesi Tengah menurun dari 65,2 persen (SKAP 2018) menjadi 54,4 persen (SKAP 2019). Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda, adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, di antaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluhan Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/pasangan millenial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;
8. Rendahnya pemahaman Remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun.

- Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;
9. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Indonesia Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Tengah dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, unmet need terus mengalami kenaikan yakni pada tahun 2018, posisi unmet need sebesar 9,9 persen (SKAP 2018) menjadi 12,7 persen pada tahun 2019 (SKAP 2019).
 10. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka prevalensi stunting masih cenderung tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan

lingkungan Di Sulawesi Tengah, angka prevalensi stunting dimuat dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dalam bentuk persentase dengan target 11,65 persen dan hanya tercapai 9,87 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi perubahan indikator menjadi jumlah keluarga, dengan target 27.927 keluarga dan tercapai 100%.

11. Meningkatnya Angka Pernikahan Dini yang Secara Nasional menempatkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Daerah Penyumbang angka pernikahan anak di Indonesia. Pernikahan Dini tersebut sangat berdampak terhadap angka kematian ibu, angka kematian anak, angka putus sekolah, angka kekerasan pada perempuan serta dampak sosial lainnya.

1.3.2 Permasalahan Utama

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru mempunyai tantangan dan permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah bagaimana meningkatkan akses, kuantitas dan kualitas pelayanan KB dan kependudukan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Tantangan Internal

- Hasil evaluasi Permendagri No 86 Tahun 2017 : Terdapat 18 Indikator yang tidak tercapai atau sekitar (58 %) dan 10 indikator yang tidak tersedia datanya sekitar (32 %)
- Laju pertumbuhan penduduk (2,1) di atas rata-rata nasional
- Angka kelahiran pada perempuan yang masih cukup tinggi (2,7) diatas nasional (2,2).
- Angka cakupan kesertaan ber KB masih rendah (76,50%)
- Angka capaian MKJP rata-rata 17,16% dari target 20,77%
- Angka unmet need pada tahun 2021 mencapai 11,96 % dari target 8,6%
- Angka pernikahan anak yang cukup tinggi ke 5 nasional (48%)
- Angka kelahiran pada remaja yang tinggi & semakin meningkat ke 4 nasional (51%)
- Indeks Pembangunan yang rendah pada capaian 52,4
- Advokasi, kampanye tentang kepndudukan, KB & ketahanan keluarga masih sangat terbatas
- Kelembagaan pengendaian penduduk & KB di daearah yang tidak seragam/bervariasi (6 kab dengan OPD P2KB)

- Belum optimalnya koordinasi penyelenggaran program di semua tingkatan
- Grand Desain Pembangunan Kependudukan belum menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan perencanaan berwawasan kependudukan.
- Rasio petugas keluarga berencana di daerah yang belum sesuai yang diharapkan hanya (1: 5) seharusnya (1:2) artinya 1 petugas melayani 2 desa.
- Keberadaan kelompok BKB,BKR,BKL & UPPKS di tingkat desa yang tidak maksimal
- Penganggaran Program Pengendalian Penduduk dan KB hanya bersumber dari APBD Provinsi (2018 3,9M),2019 (12,1 M), 2020 (1,9M), 2021(8,5 M), tahun 2022 pagu indikatif (10 M)

b. Tantangan Eksternal

- Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk yang berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata;
- Adanya rentang kendali manajemen pelayanan pengendalian penduduk dan KB antara Provinsi dengan Kabupaten Kota akibat dari struktur kelembagaan Provinsi dan kabupaten/ Kota yang tidak seragam serta masih adanya tugas dan kewenangan oleh pusat masih dilaksanakan oleh perwakilan bkkbn sebagai perwakilan pusat yang belum diserahkan ke pemerintah Provinsi.
- Belum adanya Akses dan Kualitas Penyelenggaraan KBKR yang Komprehensif berbasis kewilayaan dan Focus pada Segmentasi Sasaran.
- Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang berbasis pengendalian penduduk Organisasi perangkat Daerah lainnya
- Masih kurangnya Pemahaman tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif sesuai Siklus Hidup, serta menguatkan Pembentukan Karakter di Keluarga.

- Belum adanya sarana dan prasarana dalam hal peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program KKBPK sesuai dengan Karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
- Belum maksimalnya pemahaman remaja dan masyarakat untuk berperan dalam intensitas generasi berencana yang berbasis komunitas (*Genre to community*).
- Belum adanya Pemaduan dan Sinkronisasi tentang Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- Adanya pemahaman dimasyarakat bahwa KB dan Kespro adalah urusan perempuan
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
- Semakin meningkatnya perilaku seks bebas dikalangan remaja

1.4 DUKUNGAN SDM , SARANA PRASARANA

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah ditahun pertama setelah pembentukannya melalui PP No. 18 Tahun 2016 melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan didukung sumber daya manusia yang kuat dan kapasitas asset/modal yang memadai. Adapun sumberdaya aparatur dan sumberdaya asset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah personil Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember sebanyak 62 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 6 Orang Pejabat Fungsional 4 Orang dan tenaga kontrak 36 Orang

Tabel 1.4.1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	3 Orang	6 Orang	9 Orang
2.	S1	5 Orang	30 Orang	35 Orang
3.	D3		13 Orang	13 Orang
4.	SMA/SMK	3 Orang	2 Orang	5 Orang
	Jumlah	11 Orang	51 Orang	62 Orang

Tabel 1.4.2 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/c			
2.	IV/ b	1 Orang	1 Orang	2 Orang
3.	IV/ a	1 Orang	5 Orang	6 Orang
4.	III / d	1 Orang	9 Orang	10 Orang
5.	III / c	2 Orang	11 Orang	13 Orang
6.	III / b	3 Orang	14 Orang	17 Orang
7.	III / a		7 Orang	7 Orang
8.	II / d		2 Orang	2 Orang
9.	II / c	2 Orang		2 Orang

10.	II / b		1 Orang	1 Orang
11	I/d	1 Orang	-	1 Orang
12.	Tenaga Kontrak	17 Orang	19 Orang	36 Orang
	Jumlah	28 Orang	70 Orang	98 Orang

Tabel 4.4. Klasifikasi Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II.a		1 Orang	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang	2 Orang	3 Orang
3.	Eselon IV.a Struktural	1 Orang	1 Orang	2 Orang
4.	Eselon IV. A Fungsional	2 Orang	2 Orang	4 Orang
5.	Pelaksana	7 orang	45 Orang	52
	Jumlah	11 Orang	51 Orang	62 Orang

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Sehubungan dengan Pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pnedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di sampaikan hal-hal sebagai berikut. Inspektorat telah melakukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah secara manajerial kepada Gubernur dengan tujuan :

- Memperoleh Informasi tentang Implementasi Sistem AKIP
- Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Insansi.
- d. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar 71,13 sehingga akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB termasuk dalam kategori BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukan bahwa komponen AKIP yang ada belum sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan para pelaku pembangunan, Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan peroses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Perencanaan pembangunan daerah akan dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat sehingga

terdapat adanya keterpaduan antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan mencerminkan apa yang ingin dicapai, dalam memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk mewujudkan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yakni “**Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju** ”.memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Kependudukan yang memberi jawaban bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana, dengan demikian menunjukkan bahwa Pembangunan Kependudukan di Sulawesi Tengah harus mendorong Kuantitas dan Kualitas Masyarakatnya dengan modal penduduk yang berkualitas akan memacu Sulawesi Tengah semakin Sejahtera dan maju yaitu mencapai kondisi yang lebih baik yaitu memiliki keunggulan, baik itu keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

Lebih Maju adalah Secara Umum **Gerak cepat** dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. **Lebih Sejahtera** dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik,terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi, social serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.

Lebih Maju adalah Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, social maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai Visi maka di Jabarkan ke dalam 9 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ;

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian visi, dan Misi dan di dukung dengan program prioritas yaitu :

- a. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi seperti Kasimbar-Tambu, Tayawa-Kolonodale, Mensung-Pasir Putih, Balingara-Toili Barat, Sigi-Poso, Mamosalato-Toili.
- b. Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);
- c. Menyediaan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;
- d. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.

Dilihat dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat terkait dengan misi ke 1, 3 dan 8. Dimana

- ❖ **Misi 1** : *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.*
- ❖ **Tujuan**: *Mewujudkan kualitas dan kuantitas melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi guna mengendalikan angka kelahiran, kematian serta angka stunting.*
- ❖ **Sasaran** : *Terlaksananya program pengendalian penduduk serta penyelenggaraan Keluarga Berencana.*
- ❖ **Misi 3** : *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.*
- ❖ **Tujuan** : *Mewujudkan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.*
- ❖ **Sasaran** : *Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga*

- ❖ **Misi 8 :** *Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Infomasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan Digital.*
- ❖ **Tujuan :** *Terwujudnya pelayanan komunikasi,informasi, dan edukasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.*
- ❖ **Sasaran :** *Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.*

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

A. Tujuan

Dalam Periode RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam mendukung program pembangunan. Hasil yang diharapkan adalah Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan keluaga.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tujuan untuk : Meningkatkan kualitas manusia provinsi Sulawesi tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan.

1. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna mengendalikan angka Kelahiran , Kematian serta Angka Stunting.
2. Mewujudkan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Terwujudnya Pelayanan Komunikasi,Informasi dan Edukasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

B. Sasaran.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga, dan Pembangunan Keluarga (KKBP), Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangga Kencana. Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam RENSTRA P2KB ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk Serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
2. Meningkatnya Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.

**Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR)	Lintas Sektor Lintas Progra,Lurah Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh.Agama,	Jumlah lintas sector,lintas program, lurah organisasi kemasayarakatan , tokoh agama tokoh adat PUS,	40 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang

		Tokoh,Adat, PUS Swasta	Swasta yang mendapat informasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi						
2	Meningkatkan Penggunaan MKJP		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti seminar KB dan Kespro	60 Orang					
3	Menurunkan Unmeed Need		Jumlah Sarana Penunjang / Materi / Spot Radio yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program kependudukan , KB dan Pembangunan Keluarga.	1 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket
4	Menurunkan Presentase tingkat ketidak berlangsungan pemakaian Kontrasepsi		Jumlah Media Cetak / Media Elektronik yang digunakan untuk Advokasi , Promosi dan KIE Program Bangga Kencana.			2 Media	2 Media	2 Media	2 Media
5	Meningkatkan Pemakaian Kontrasepsi		Jumlah Mitra Kerja yang terlibat dalam Advokasi dan			10 Mitra	10 Mitra	10 Mitra	10 Mitra

	Pasca Persalinan	KIE Bangga Kencana						
		Jumlah Mitra Kerja yang bekerjasama dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja	10	10 Mitra	10 Mitra	10 Mitra	10 Mitra	10 Mitra
		Jumlah Sarana Promosi dan Konseling Kespro yang tersedia sesuai dengan Kearifan		2 Saran a	2 Sarana	2 Saran a	2 Saran a	2 Saran a
		Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-hak Reproduksi yang tersedia sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		2 Materi	2 Materi	2 Materi	2 Materi	2 Materi
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam hal KB dan Kesehatan Reproduksi		13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota

PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama OPD	Nama Kelompok	Jumlah Dana	Keterangan	Jumlah Kelompok
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROV SULTENG	Program Keluarga Sejahtera			
2		Kelompok UPPKS, Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 44.851.575	Pembinaan peningkatan Kapasitas di Kabupaten Parigi Moutong (Marantale)	1 Kelompok (75 Orang)
3		Kelompok Tribina Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 44.851.300	Pembinaan peningkatan Kapasitas mitra dan organisasi di Kabupaten Parigi Moutong (Gedung Bupati Parigi)	1 Kelompok (75 Orang)
4		Kelompok Genre (Generasi Berencana) Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 20.019.800	Pembinaan Edukasi dan Informasi GENRE di Kota Palu	3 Kelompok (300 Orang)
5		Kelompok Remaja, Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 51.010.500	Worshop CND dan Stuntingdi Kab Poso	1 Kelompok (100 Orang)
6		Kelompok Remaja, Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 56.836.023	Worshop CND dan Stuntingdi Kab Tojo Unauna	1 Kelompok (100 Orang)
7		Kelompok Remaja, Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 46.184.500	Worshop CND dan Stuntingdi Kab Buol	1 Kelompok (50 Orang)
8		Kelompok Remaja, Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 29.557.925	Worshop CND dan Stuntingdi Kab Sigi	1 Kelompok (50 Orang)
9		Kelompok Remaja, Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 46.974.600	Worshop CND dan Stuntingdi Kab Balut	1 Kelompok (50 Orang)
10		Kelompok UPPKS, Pendamping Keluarga, Kader Tribina, dan PIK-R	Rp. 13.947.450	Pembinaan kelompok UPPKS lokus Stunting di Kabupaten Sigi	1 Kelompok (30 Orang)
Program Keluarga Berencana					

	Pria Mendukung KB	Rp27,208,625	Pria mendukung program KB dan Kespro di Palu	1 Kelompok
11	Pria Mendukung KB	Rp38,308,625	Pria mendukung program KB dan Kespro di Buol	1 Kelompok
12	Pria Mendukung KB	Rp45,988,900	Pria mendukung program KB dan Kespro di Banggai Kepulauan	1 Kelompok
	Jejaring Kemitraan KB	Rp34,862,550	Penguatan jejaring kemitraan program KB dalam mendukung banga kencana di Tolitoli	3 Kelompok
13	Jejaring Kemitraan KB	Rp40,337,550	Penguatan jejaring kemitraan program KB dalam mendukung banga kencana di Bangkep	3 Kelompok
14	Jejaring Kemitraan KB	Rp35,252,300	Penguatan jejaring kemitraan program KB dalam mendukung banga kencana di Morowali Utara	1 Kelompok
Program Pengendalian Penduduk				
	FGD Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kab. Donggala	Rp19,025,000	Sosialisasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Kelompok 25 Orang
	FGD Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kab. Morowali Utara	Rp31,805,000	Sosialisasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Kelompok 25 Orang

2.2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2026 ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. *Sosialisasi dan Advokasi*

Keberhasilan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil kerja jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja dan kontribusi positif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta peran aktif dari segenap komponen organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka harus diupayakan masuknya wawasan kependudukan dan keluarga berencana sebagai asas pembangunan di daerah/kabupaten/kota maupun di Organisasi Perangkat Daerah serta institusi satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera disemua golongan masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan peningkatan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor provinsi maupun kabupaten/kota.

2. *Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana*

Peran masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan KB saat ini dan masa yang akan datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kependudukan dan keluarga berencana hanya dapat diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek atau penyelenggara maupun pelaku serta terlibat aktif pada pembangunan kependudukan dan KB. Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat

adalah keterlibatan aktif dalam pengembangan Upaya pengelolaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia serta kelompok-kelompok yang mendukung keluarga berencana di desa/kelurahan seperti pengembangan Posyandu, Posbindu, dasa wisma maupun kegiatan lainnya. Untuk itu perlu upaya peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan kualitas tenaga lapangan dan kader dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

3. *Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kependudukan dan KB dengan pengutamaan pada upaya Komunikasi Informasi dan Edukatif.*

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana harus mampu menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan sarana prasarana maupun pembiayaan). Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas masalah kuantitas dan kualitas kependudukan dan keluarga berencana dapat dikurangi. Untuk itu perlu peningkatan kualitas alat, obat dan sarana pelayanan serta jaminan pembiayaan dengan mendorong masyarakat untuk mengikuti program Jaminan Sosial Nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor terutama dengan sektor kesehatan dan BPJS.

Untuk mendorong masyarakat proaktif dalam mengikuti program kependudukan dan keluarga berencana dibutuhkan penguatan komunikasi, informasi dan edukasi melalui peningkatan kerjasama dengan sektor terkait serta kelembagaan yang ada di daerah. Upaya KIE dilakukan dengan berbagai cara antara lain penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan berbagai media maupun sarana lainnya dengan memperhatikan karakteristik, budaya dan ekonomi setiap daerah.

4. *Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan Keluarga Berencana.*

Penyelenggaraan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terdistribusi secara merata dilapangan. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kependudukan dan KB

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga pelayanan publik di daerah. Adapun program-program tersebut terdiri dari 4 (Empat) program sebagai berikut:

mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2,3**Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Fisik terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	/Sub Kegiatan	Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan(Rp)	Bertambah/(Berkurang)	Realisasi Rp	Capaian
1	Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk serta Penyelenggaraan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	471.865.725 242.527.525	771.865.450 392.527.350	299.999.725 149.999.825	648.026.190 272.649.330	83,96 69,46	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)Prov. Sulteng Tahun 2022

Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	642.223.875	762.208525	124.984.650	745.161.597

	Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
	- Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	83.463.500	82.563.500	(900.000)	82.493.839 99,9
2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	484.200.375	610.085.025	125.884.650	588.107.758 96,4
	- Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	177.221.575	175.421.575	1.800.000	174.906.974 99,07

	Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
-	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi	195.306.150	285.955.050	90.648.900	279.317.477	99.07
	Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
-	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	111.672.650	148.708.400	37.035.750	133.883.307	90,03
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	965.893.450	1.526.648.150	560.754.700	1.417.412.037	92.08
	1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	934.692.125	1.455.574.700	520.882.575	1.403.495.052	96,4

	- Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	59.659.925	58.609.925	(1.050.000)	58.609.925	100
	- Pengembangan Prototipe Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	6.660.000	306.660.000	300.000.000	306.660.000	100
	- Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	262.499.850	234.808.900	(27.690.950)	233.899.278	99,6
	- Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	299.999.900	310.808.900	10.809.000	310.162.337	99,8
	- Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/ R)	91.521.000	90.621.000	(900.000)	85.519.300	94,4
	- Sub. Kegiatan Pengembangan dan Perbaikan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling Remaja	35.000.000	0	(35.000.000)	0	0

	(PIK / R), Media Promosi, alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana lainnya yang di butuhkan			
-	Sub, Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK /R)di Kampung KB	35.000.000	3.800.000	(31.200.000)
-	Sub. Kegiatan Penyediaan Kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1000 hari pertama kelahiran (HPK)	30.309.325	29.793.850	(515.475)
-	Sub. Kegiatan Penyerasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang mendukung tercapaiannya IPK	30.600.325	41.240.325	10.640.000
-	Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	20.019.800	140.019.800	120.000.000
				140.019.800
				100

	- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	24.372.000	23.112.200	(1.260.000)	21.443.438	92,8
	- Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguanan Penyiapan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0	41.160.000	41.160.000	41.160.000	100
	- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	39.050.000	174.940.000	135.890.000	174.940.000	100
2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	31.201.325	71.073.450	39.872.125	13.916.985	19,6

	- Sub. Kegiatan Pengelola Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PKKS)	31.201.325	13.947.450	(17.253.875)	13.916.985	99,8
	- Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	0	57.126.000	57.126.000	0	0

Tabel 2,4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan(Rp)	Bertambah/(Berkurang)	Realisasi Rp	Capaian
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berkualitas (Akuntabel,Inovatif,Efisien dan Transparan)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.388.601.089	9.856.744.365	2.468.143.276	9.259.481.691	93,9
			60.346.350	14.690.350	(45.656.000)	13.759.550	93,7

	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.667.900	1.667.900	0		1.667.900	100
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.806.575	11.806.575	0		11.105.775	94,06
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.215.875	1.215.875	0		985.875	81,08
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.616.116.560	6.843.589.812	227.473.252		6.489.634.072	98,1
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.117.262.560	6.313.185.812	195.923.252		5.972.138.572	94,6
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	459.216.000	489.066.000	29.850.000		476.857.500	97,5
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.550.000	32.250.000	1.700.000		32.250.000	100
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.088.000	9.088.000	0		8.388.000	92,3

	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	73.093.800	73.093.800	73.090.000	100
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	73.093.800	73.093.800	73.090.000	100
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.371.000	1.562.312.575	1.330.941.575	1.350.755.840	86,5
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	204.466.000	201.966.000	204.415.000	100
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.450.000	171.771.375	105.321.375	171.745.000	100
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.571.000	123.764.2000	111.193.200	123.701.000	100
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.850.000	1.062.311.000	912.461.000	850.894.840	80
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	630.000.000	630.000.000	617.500.000	98

	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	0	630.000.000	630.000.000	617.500.000	98
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.617.179	459.807.828	212.190.649	441.493.116	96
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	318.000	318.000	0	318.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	150.023.504	186.169.653	36.146.149	170.088.215	91,4
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.275.675	273.320.175	176.044.500	271.086.901	99,2
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	233.150.000	273.250.000	40.100.000	273.249.113	100
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendraan Dinas Operasional atau lapangan	217.000.000	257.100.000	40.100.000	257.099.113	100
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.	16.150.000	16.150.000	16.150.000	16.150.000	100

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Mewujudkan kualitas dan kuantitas melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi guna mengendalikan angka kelahiran,kematian serta angka stnting.	Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk Serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada tahun 2022 mencapai 1,33 pada tahun 2026 menjadi 1,02	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu . Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan metode, yaitu geometrik	KEPALA DINAS
2			Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) pada tahun 2022 mencapai 52,47% menjadi	iBANGGA atau Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi Ketentraman , Kemandirian dan Kebahagiaan Keluarga.hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan Pembangunan Keluarga di	KEPALA DINAS

			62,02% pada tahun 2026	suatu wilayah yang diklarifikasi menjadi tangguh, berkembang dan rentan	
--	--	--	------------------------	---	--

2.5 PERJANJIAN KINERJA (LAMPIRAN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.

3.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Penyelenggaraan Pembangunan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “**Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**”, maka peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana dan penanggungjawab terhadap pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk mendukung pencapaian target dan sasaran program dalam RPJMD 2021-2026 yaitu optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk pada tahun 2017 dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2022 sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja merupakan gambaran capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja antar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Gubernur Sulawesi Tengah dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai oleh Organisasi. Pengukuran tersebut akan menghasilkan apakah target tercapai atau tidak serta perlu dilakukan analisis mendalam atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada Tahun 2022 1,26 Pada Tahun 2026 menjadi 1,02	1,26	1,33	1,26	

2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) pada Tahun 2022 54,38 pada tahun 2026 menjadi 62,02	54,38	52,47	54,38	
---	--	-------	-------	-------	--

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan tahun terakhir (2021 dan 2022)
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (disandingkan tahun 2022 dengan target akhir tahun 2026)
- d. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional IKU

- e. **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada awal tahun 2021 telah ditetapkan 31 indikator yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) yang berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan terdapat 7 indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas P2KB. terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran sebagai berikut :

- a) kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk yang berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- b) kompetensi ASN DP2KB dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata;

- c. Adanya rentang kendali manajemen pelayanan pengendalian penduduk dan KB antara Provinsi dengan Kabupaten Kota akibat dari struktur kelembagaan Provinsi dan kabupaten/ Kota yang tidak seragam serta masih adanya tugas dan kewenangan oleh pusat masih dilaksanakan oleh perwakilan bkkbn sebagai perwakilan pusat yang belum diserahkan ke pemerintah Provinsi
- d. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya tenaga pengendalian penduduk dan KB dilapangan, dimana saat ini rasio tenaga PLKB di Sulteng sebagai ujung tombak di lapangan di sekitar 1 : 6 yang seharusnya 1 : 2. Selain itu kompetensi dan kemampuan tenaga PPKBD dilapangan yang masih terbatas. Hal ini sangat menganggu produktifitas sdm dalam meningkatkan capaian program dan Kegiatan Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Capaian Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
 - a) Tersedianya sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - b) Tersedianya kelompok-kelompok fasilitator dalam program pembinaan;
 - c) Adanya regulasi tentang Pengendalian Penduduk;
 - d) Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas;
 - e) Tersedianya sumber dana yang mendukung program dan kegiatan Pengendalian Penduduk.
 - f) Adanya dukungan dana operasional program APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota ;
 - g) Tersedianya fasilitas pelayanan (Puskesmas, Pustu, RS dan Posyandu);
 - h) Tersedianya tenaga medis paramedis dan penyuluhan lapangan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
 - i) Adanya regulasi tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - j) Terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah

- k) Terbentuknya kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - l) Tersedianya, Perda/Pergub, Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota sebagai payung hukum kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB;
 - m) Adanya Pokja-pokja, forum-forum dan gugus tugas

F. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (mengapa tidak mencapai target di hasilkan).

Sumber daya yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mendukung Gubernur dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Perjanjian Kinerja;

- a. Permberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah provinsi;
 - b. Secara bertahap melakukan integrasi system aplikasi yang sudah terbangun di perangkat daerah. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang pelaksanaan e-Government oleh perangkat daerah;
 - c. Bekerjasama dengan provider yang dapat menyediakan bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat di distribusikan pada semua perangkat daerah guna meminimalkan penggunaan anggaran belanja bandwidth pada perangkat daerah;
 - d. Memaksimalkan pengumpulan data statistik sektoral di perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan guna mendukung Satu Data Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam pencapaian sasaran kinerja pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat program yang menunjang sebagai berikut :

❖ **Sasaran Pertama**

Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berkualitas (Akuntabel,Inovatif,Efisien dan Transparan)

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

❖ **Sasaran Kedua**

Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk serta Penyelenggaraan Keluarga

2. **Program Pengendalian Penduduk**

❖ **Sasaran Ketiga**

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana

3. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

❖ **Sasaran Keempat**

Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

4. **Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Sumber Pendanaan APBD PERUBAHAN TAHUN 2022

No	Program	Jumlah Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.856.365
2.	Program Pengendalian Penduduk	771.865.450
3.	Program Keluarga Berencana	767.208.525
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.455.574.700
	JUMLAH	12.922.466.490

3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2022

Tabel 3.2
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan terhadap Anggaran (%)	Ket
			1	2						
1	1 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			3						10
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)				-		12.922.466.490	12.070.081.515	93,4%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran yang Baik	100	%	100	100	9.856.744.365	9.259.481.691	93,9%	

3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2022

Tabel 3.2

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan terhadap Anggaran (%)	Ket
1	2	3							10
1	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)		-			12.922.466.490	12.070.081.515	93,4%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran yang Baik	100 %	100	100	9.856.744.365	9.259.481.691	93,9%	

Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Capaian Kinerja ASN	100	%	100	100	14.690.350	13.759.550
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	1	Dokumen	1	100	1,667.900	1,667.900
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	2	Dokumen	2	100	11.806.575	11.105.775
Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD	2	Dokumen	1	100	1.215.875	985.875
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	0	0	0	0	0	0

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangakat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan, Gaji ASN, Honor Non ASN, Tunjangan ASN, dan Akuntansi Keuangan	100	%	100	100	6.843.589,812	98,1
						6.489.634,072	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)Prov. Sulteng Tahun 2022

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	100	73.093.000	73.093.000	100
	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Tersedianya Pakaian Dinas , Batik ASN Dan Non ASN	12	Bulan	1	100	73.093.000	73.093.000	100
	Sub. Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Peningkatan SDA	0	0	0	0	0	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	1.562.312.575	1.350.755.840	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	100	204.466.000	204.415.000	100

Sub .Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Bahan Logistik Kantor	6	Unit	6	100	171.771.375	171.745.000	100
Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	1	100	123.764,200	123.701.000	100
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlasaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	Kab/Kota	13	100	1.062.311.000	850.894.840	80
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	333,242,100	329,222,013	99
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Dokumen/Surat	12	100	318.000	318.000	100
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi /Internet dan Instalasi	1	tahun	1	100	186.169.653	170.088.215	91,4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)Prov. Sulteng Tahun 2022

	Penerangan dan Sumber Daya Air	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	12	Bulan	12	100	273.320.175	271.086.901	99,2
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Kegiatan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barnag Milik Daerah DP2KB	100	%	100	100	310,940,000	310,922,604	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peneliharaan ,Baiaya Peneliharaan,Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / lapangan	18	Unit	18	100	257.100.000	273.249.113	
	Sub. Kegiatan Peneliharaan Peralatan dan mesin Lainya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	18	Unit	18	100	16.150.0000	16.150.000	100

2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi,Pembentukan Rumah data dan penyusunan profil Kependudukan KKBPK	100	%	100	100	648.026.190	771.865.450	83,96
	Kegiatan Pemaduan dan Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerinta Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi, Pembentukan Rumah Data dan Penyusunan Profil Kependudukan n	100	%	100	100	392.527.525	272.649.330	69,46
	Sub.Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kabupaten yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi GDPK	3	Kab/Kota	3	100	392.527.350	272.649.330	69,46

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	100	%	100	100	379.338.100	375,376,860
Sub.Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendaatan dan Pemutakhiran Data Keluarga	tersedianya Data keluarga yang mutakhir	13	Kab/Kota	13	100	379.338.100	375,376,860
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Capaian Pembinaan KB	100	%	100	100	767.208.525	745.161.597
3 Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi ,Informasi dan Edukasi (KIE)	Prosentase Peserta yang Mengikuti Advokasi dan KIE KB dan Kespro serta Provider yang memahami	100	%	100	100	610.085.025	157.053.839
							100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Prov. Sulteng Tahun 2022

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi KIE dan KB	umlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 1 100	Dok 1 100	74.560.000 74.560.000 74.560.000
Sub.Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	umlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	umlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 1 100	Dok 1 100	74.560.000 74.560.000 74.560.000
Sub.Kegiatan Penguanan Kerja sama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam	Dokumen Hasil Penguanan Kerja Sama	umlah Dokumen Hasil Penguanan Kerja Sama	80 80	Orang/Mitra Kerja 80	82.493.839 82.493.839 99,9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)Prov. Sulteng Tahun 2022

Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Advokasi promosi dan KIE Peogram KKBPK	Jumlah Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	100 %	100 %	610.085.025	588.107.	96,4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)Prov. Sulteng Tahun 2022

	Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Peayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	150	Orang/dok	150	100	175.421.575	174.906.974
Sub. Kegiatan Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Peayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakata n Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	99,7						
Sub.Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dalam	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan	120	Organisasi/Or ang	120	100	285.955.050	279.317.477	97,68

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kerja Sama Organisasi KeMasyarakat n dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Sub.Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berenama (Bangga Kencana)	120	Orang/ormas	120	100	148.708.400	133.883.307

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	%	100	100	100	1,279,795,325	1,274,450,325
Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Organisasi/Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	100	100	100	1,455,574,700	1,417,412,037
4	Sub. Kegiatan Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan	1	Dokumen	1	100	58,609,925	58,609,925
								100

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100 %	100 %	100 %	100 %	1,279,795,325	1,274,450,325	100
Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Organisasi/Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	1.455.574.700	1.417.412.037	92,08
4	Sub. Kegiatan Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Keluarga	1	Dokumen	1	100	58.609.925	58.609.925
								100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)Prov. Sulteng Tahun 2022

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	2	Materi	2	100	306.660.000	306.660.000
Sub Kegiatan Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	50	orang	50	100	234.808.900	233.899.278
Sub.Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang / Kelompok Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	50	orang	50	100	234.808.900	99,6

Sub.Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Keluarga/ Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	250	Keluarga	250	100	310.808.900	310.162.337	310.162.337
Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R)	h PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	300	Orang	300	100	90.621.000	85.519.300	85.519.300
Sub.Kegiatan Pengembangan dan Perbanyakkan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling - Remaja (PIK/R) ,Media	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakkan Materi	10	Organisasi/K elompok	10	100	0	0	0

Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja , dan Sarana Prasarana Lainya yang di butuhkan	Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Remaja	Organisasi PIK	20	100	3.800.000	3.800.000
Sub.Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R) di kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R Remaja)	Jumlah Dokumen/ Kab/Kota Kebijakan dalam rangka	Kab/Kota	13	100	29.793.850	29.793.850
Sub.Kegiatan Penyediaan Kebijakan Dalam rangka Penyiapan Pengasuhan	Dalam rangka Penyiapan Pengasuhan	dalam rangka					100

1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK))Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyeriasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga IPK	13 a	Dok/Kab/Kot	13 100	41.240.325 38.647.124
Sub.Kegiatan Penyeriasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga IPK	93,7					
Sub.Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100	Paket	100	140.019.800 140.019.800	100

)Pembangunan Keluarga	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga	13	Kab/kota	13	100	23.112.000	21.443.438	92,8
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi .Pembimbingan .Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK HPK	Jumlah Kelompok masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan bimbingan 1000 HPK	40	Kelompok	40	100	41.160.000	41.160.000	100

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	20	Kelompok	40	100	174.940.000	100
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen/Lap oran Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan an Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	100	100	71.073.450	13.947.450

Sub. Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	20	Kelompok	40	100	13.947.450
						13.916.985
						99,8
Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	20	Kelompok	20	100	57.126.000
						0
						0

BAB IV

PENUTUP

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut, diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* Provinsi Sulawesi Tengah yang diprioritaskan untuk dicapai, serta indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran untuk menilai keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dari target yang harus dicapai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)Prov. Sulteng Tahun 2022

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, maka pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang ditargetkan dapat dicapai. Selanjutnya untuk mengukur kinerja sasaran dari yang ditargetkan, digunakan dokumen Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) dari hasil analisis realisasi tabel Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) tersebut, maka prosentase tingkat capaian kinerja >30% berhasil dicapai. Ini menunjukkan hasil pencapaian kinerja berhasil dicapai sesuai dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2022.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditargetkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi .

4.1. KESIMPULAN

1. Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk pada awal tahun 2017 dan dokumen laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 merupakan laporan Lakip yang kelima.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan 4 sasaran strategis, 4 program, 11 kegiatan, 37 Sub Kegiatan dan 7 indikator kinerja utama, 11 indikator kinerja kunci output dan Outcome kegiatan.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran yaitu dari 10 indikator kinerja yang

telah ditetapkan pada tahun 2018, Walaupun Presentasi Anggaran yang dicapai sebesar 90.25% Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 4,45% dibandingkan tahun 2017 akan tetapi target Capaian Kinerja ditahun 2018 dapat terpenuhi bahkan terdapat kegiatan Inovatif dalam Rangka mendukung pencapaian Target Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Sulawesi Tengah seperti tebentuknya Merit Health Center yang bertujuan menurunkan Pernikahan Dini di Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu Tersusunya Grand Desain Pembangunan Kependudukan Sulawesi Tengah yang merupakan Acuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Sektor dalam Program Kependudukan. Selain kedua Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan kita juga berhasil mendukung Program Nasional yakni dimana Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bapak Gubernur Sulawesi Tengah di Anugrahi Penghargaan Satyalancana Pembangunan dan Wira Karya Tahun 2018 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berhasil dalam “ ***Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKP) di Provinsi Sulawesi Tengah*** ” .

1. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa kendala yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana yang terbatas, organisasi kelembagaan yang masih beragam, dukungan pembiayaan yang terbatas serta Mewabahnya Covid-19 di Indonesia Khususnya di Palu (Sulawesi Tengah) memiliki Dampak Tethadap Capaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

4.2. SARAN.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk :

1. Memberikan masukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan yang diberikan oleh organisasi serta dapat memberikan masukan tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari organisasi atau DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepada seluruh masyarakat diharapkan kesediaannya untuk dapat lebih bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah agar pelayanan yang diberikan oleh DP2KB Kerjasama ini antara lain dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi aktif.
3. Diharapkan DP2KB menerapkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh Dinas, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat segera terwujud. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, adalah tugas dan kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya di masa yang akan datang, segala upaya perbaikan dan penyempurnaan LAKIP ini dan peran Serta semua pihak kami sampaikan terima kasih. Semoga upaya – upaya kita dalam meningkatkan kinerja untuk ikut

membangun bangsa dan negara, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

SISTEMATIKA LAKIP DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Laporan Akuntabilitas kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini bertujuan mengedifikasi permasalahan yang terjadi bagi peningkatan kinerja di masa datang.

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUTY ZARFIANA, SH, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. RUSDY MASTURA

Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 Juni 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Rusdy Mastura".

H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tuty Zarfiana".

TUTY ZARFIANA, SH, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19650211 199006 2 001

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksebilitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Guna Mengendalikan Angka Kelahiran Serta Angka Stunting.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP)pada tahun 2022 mencapai 1,26 pada tahun 2026 menjadi 1,02 ➢ Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)pada tahun 2022 Mencapai 54,38 % menjadi 62,02% pada tahun 2026 	1,26 54,38%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 471.865.725	APBD
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 642.223.875	
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 965.893.450	
T o t a l	Rp. 2.079.983.050	

Palu, 22 Juni 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH.



H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROVINSI SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19650211 199006 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFINA A.DEU,SKM. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TUTY ZARFIANA, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Mei Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA.

TUTY ZARFIANA, SH, M.Si
Pembina Utama Madya / IVd
Nip. 19650211 199006 2 001

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	❖ Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64,50

Program	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 7.388.601.089	APBD

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.


TUTY ZARFIANA, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA


ALFINA A. DEU, SKM, M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARLIANY ROTINSULU, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program , Keuangan dan Asset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Mei Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN
DAN ASSET.

MARLIANY ROTINSULU, ST
Penata Tkt. I/III^d
Nip. 19760315 201001 2 005

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

ALFINA A. DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt I / IV^b
Nip. 19670701 198903 2 010

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASSET
TAHUN 2022

N O	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Sistim Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Sakip • Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD • Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD • Jumlah orang Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	74 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Orang
2.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi anggaran adminitirasi keuangan perangkat daerah • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN • Jumlah orang Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD • Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 	97% 95 Orang 24 Orang 2 Dokumen 1 Laporan
3.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Prsesentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah DP2KB • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 	100 % 18 Unit 18 Unit

Kegiatan	Anggaran	Ket.
1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 60.346.350	APBD
• Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.667.900	
• Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 11.806.575	
• Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Rp. 1.215.875	
• Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 45.656.000	
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.616.116.560	
• Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.117.262.560	
• Sub.Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 459.216.000	
• Sub. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 30.550.000	
• Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 9.088.000	
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 233.150.000	
• Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Baiaya Pemeliharaan,Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 217.000.000	
• Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Rp. 16.150.000	

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN DAN ASSET.

MARLIANY ROTINSULU, ST
Penata Tkt. I/IId
Nip. 19760315 201001 2 005

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ALFINA A. DEU, SKM, M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENI, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALFINA A.DEU, SKM. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Mei Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM.

DENI, SKM
Penata Muda Tkt.I/ IIIb
Nip. 19800402 200701 1 006

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

ALFINA A. DEU, SKM. M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Bahan Logistik Kantor ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentase ketatausahaan dan Administrasi Umum Perangkat Daerah ▪ Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ▪ Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ▪ Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ▪ Jumlah Kab/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	100%
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran Kegiatan Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ▪ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▪ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ▪ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 	1 Paket 6 Unit 1 Paket 13 Kab/Kota 100% 12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 231.371.000	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Sub .Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Rp. 2.500.000 Rp. 66.450.000 Rp. 12.571.000 Rp. 149.850.000	
2. Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 247.617.179	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	Rp. 318.000 Rp. 150.023.504 Rp. 97.275.675	
	Total	Rp. 478.988.179	

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

UMUM.

DENI, SKM

Penata Muda Tkt.I/ IIIb
Nip. 19800402 200701 1 006

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA


ALFINA A. DEU, SKM, M.Si
Pembina Tkt I / IVb
Nip. 19670701 198903 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEYKE M. WONGKAR, S.Farm. M.Si. Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan KIE, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Mei Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE

MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
Pembina IV/a
Nip. 19690519 199403 2 010

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK ADVOKASI DAN KIE
TAHUN 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate)dari Tahun 2022 mencapai 2,60 menjadi 2,30 pada tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Capaian Pengendalian Penduduk 	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 471.865.725	APBD
Total	Rp. 471.865.725	

Palu, 13 Mei 2022

PIHA KEDUA
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.**

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19650211 199006 2 001

PIHAK PERTAMA
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE**

MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
 Pembina IV/a
 Nip. 19690519 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. BURHAN TAHIR , MM. Apt
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahamanan dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 07 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip19670704 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TENGAH TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR) dari tahun 2022 mencapai 75,40 menjadi 75,80 % Pada Tahun 2026 Meningkatnya Peserta KB Aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari tahun 2022 mencapai 13,35 menjadi 13,80 pada Tahun 2026 Menurunkan Presentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need) dari tahun 2022 mencapai 14,63 menjadi 13% Pada Tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana 	100%
2	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR) pada tahun 2022 mencapai 50/1000 menjadi 44/1000 pada Tahun 2026 Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas yang di ukur dengan 3 dimensi (Ketentraman, Kemandirian, Kebahagiaan) 	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahatera 	100%

Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 642.223.875	APBD
2.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 965.893.450	

Total Rp. 1.608.117.325

Palu, , 07 Februari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA.**

TUTY ZARFIANA, SH, M,Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001

KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip19670704 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA ZURIATI, SE, MM
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MEYKE M. WONGKAR, S. Farm. M.Si. Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan KIE, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Mei Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, , 13 Mei 2022

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE

MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
Pembina IV/a
Nip. 19690519 199403 2 010

PIHAK PERTAMA

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
INFORMASI KELUARGA

RINA ZURIATI, SE. MM
Pembina
Nip19711027 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran Kegiatan Tersedianya Data Keluarga yang Mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Perencanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 	100 %
2	Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen / Kab.Kota Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga 	13 Dokumen/ Kab/Kota

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Provinsi	Rp. 229.338.200	APBD
• Sub.Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga.	Rp. 229.338.200.	
Total	Rp. 229.338.200	

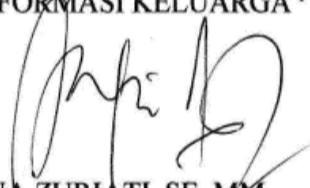
Palu, 13 Mei 2022

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE


MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
Pembina IV/a
Nip. 19690519 199403 2 010

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
INFORMASI KELUARGA


RINA ZURIATI, SE. MM
Pembina
Nip19711027 199803 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. RIFAI, SH
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MEYKE M. WONGKAR, S. Farm. M.Si. Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan KIE, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Mei Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE

MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
Pembina IV/a
Nip. 19690519 199403 2 010

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN

MOH. RIFAI, SH
Penata
Nip. 19850507 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pemanfaatan GDPK Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Prsentase Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Pengendalian Kuantitas Penduduk 	100 %
2	Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kab.Kota / Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK 	3 Kab.Kota/ Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pemaduan dan Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK. 	Rp. 242.527.525	APBD
Total	Rp 242.527.525	

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
ADVOKASI DAN KIE

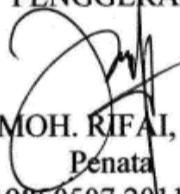


MEYKE M. WONGKAR, S.Farm, M.Si. Apt
Pembina IV/a
Nip. 19690519 199403 2 010

Palu, 13 Mei 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN



MOH. RIFAI, SH.
Penata
Nip. 19850507 201101 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN RIJANTI, SKM, M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber – KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. BURHAN TAHIR, MM, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

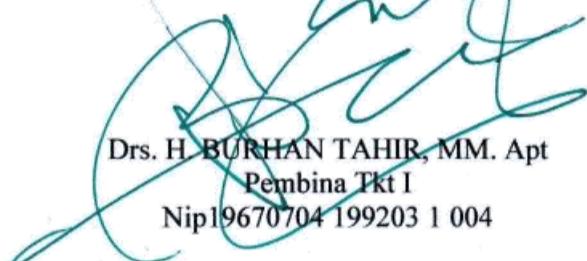
PIHAK KEDUA

Palu,07 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN
BER-KB


Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip19670704 199203 1 004


DIAN RIJANTI, SKM, M.Si
Pembina
Nip. 19691108 199501 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Sasaran Kegiatan Terlaksananya peserta yang mengikuti advokasi dan KIE KB dan Kespro serta Provider yang memahami Promosi KIE dan KB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Sasaran Sub Kegiatan Terwujudnya Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 	<p>❖ Presentase Peserta Advokasi dan KIE KB dan Kespro Serta Provider yang Memahami Promosi KIE dan KB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 	100% 1Dokumen 50 Orang
2	<p>Sasaran Kegiatan Terlaksananya Peserta Yang Memahami Manfaat Promosi KIE KB dan Kespro Untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Serta Terlibat Dalam Keberlangsungan Penggunaan Kontrasepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi KeMasyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 	<p>❖ Prsentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Peserta Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB • Jumlah Peserta Peran Pria dalam mendukung Program KB • Jumlah Peserta Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dalam mendukung (Bangga Kencana) 	100 % 150 Orang 120 Orang 120 Orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Rp.	APBD
1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi ,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	158.023.500	
• Sub.Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi ,Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal Budaya Lokal	Rp. 74.560.000	
• Sub.Kegiatan Penguatan Kerja sama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Rp. 83.463.500	
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	484.200.375	
• Sub. Kegiatan Pengembangan Strategi Operasioanal dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Peayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Rp. 177.221.575	
• Sub.Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Rp. 195.306.150	
• Sub.Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Rp. 111.672.650	
Total	Rp 642.223.875	

Palu,07 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
KESERTAAN BER-KB



DIAN RIJANTI, SKM,M.Si
Pembina
Nip. 19691108 199501 2 001

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip 19670704 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No. 100 Palu Telp. (0451)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HASJMAN SYAMSUL, M. Kes
Jabatan : Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. BURHAN TAHIR, MM, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam Rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi Tanggung Jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Perjanjian Kinerja ini berlaku terhitung sejak bulan Februari Tahun 2022.

Demikian Perjanjian Kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Palu, 07 Februari 2021

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip19670704 199203 1 004

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Ir. HASJMAN SYAMSUL, M. Kes
Pembina
Nip19650621 198603 1 011

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran Kegiatan Terlaksananya pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengembangan Unit Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB ▪ Sasaran Sub Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyerasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ▪ Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Presentase Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ● Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ● Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal ● Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana ● Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ● Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) ● Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan ● Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB ▪ Jumlah Dokumen Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) ● Jumlah Dokumen Hasil Penyerasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ● Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga(Indeks Pembangunan Keluarga) ● Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) ● Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 	100 % 1 Dokumen 2 Unit 50 Orang 250 Laporan 300 Organisasi 10 Organisasi 20 Organisasi 13 Dokumen 13 Dokumen 100 Dokumen 13 Laporan 20 Unit 100% 20 Dokumen
2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran Kegiatan terlaksananya pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga Sejahtera. ▪ Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Presentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Provinsi dan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesjahteraan Keluarga ● Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 	

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Rp. 934.692.125	APBD
	• Sub. Kegiatan Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 59.659.925	
	• Sub Kegiatan Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Rp. 6.660.000	
	• Sub.Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Rp. 262.499.850	
	• Sub.Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Rp. 299.999.900	
	• Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R)	Rp. 91.521.000	
	• Sub.Kegiatan Pengembangan dan Perbanyakkan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling - Remaja (PIK/R) ,Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja , dan Sarana Prasarana Lainya yang di butuhkan	Rp. 35.000.000	
	• Sub.Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R) di kampung KB	Rp. 35.000.000	
	• Sub.Kegiatan Penyediaan Kebijakan Dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Rp. 30.309.325	
	• Sub.Kegiatan Penyeriasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga IPK	Rp. 30.600.325	
	• Sub.Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Rp. 20.019.800	
	• Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Rp. 24.372.000	
	• Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi ,Pembimbingan ,Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Rp. 39.050.000	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Propinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 31.201.325	
	• Sub. Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Rp. 31.201.325	
	T o t a l	Rp. 965.893.450	

Palu, 07 Februari 2021

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG KB KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Drs. H. BURHAN TAHIR, MM. Apt
Pembina Tkt I
Nip19670704 199203 1 004

PIHAK PERTAMA

KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Ir. HASJMAN SYAMSUL, M. Kes
Pembina
Nip19650621 198603 1 011

